

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) adalah dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan kinerja OPD (pelayanan publik) dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa kewenangan Daerah mencakup urusan seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 (lima) bidang urusan yang secara *limitative* telah ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya seluruh urusan wajib dan pilihan dijalankan secara bersama-sama (*concurrent*) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan. Antara lain diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang berasal dari pejabat dan staf perangkat daerah yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah. Tim renstra ini selanjutnya membuat agenda tim kerja. Tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan Penyusunan RPJMD. Tim Penyusun Renstra mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya menyiapkan tabel-tabel /matrik

komplikasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis kemudian data tersebut diolah dan disusun melalui tahapan- tahapan yang telah diagendakan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Visi, misi, tujuan, strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dan visi, misi dan program Kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Keepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kulon Progo menyusun dan menepapkan Renstra 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.

Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setiap tahun/kinerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945;
3. Landasan operasional :
 - a.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Penendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- k. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu;

- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja OPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Kementerian Dalam Negeri

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Fungsi

Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2. Tugas

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. melaksanakan kegiatan Ketatausahaan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretariat, terdiri dari:
 - a. SubBagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian

3) Seksi Perubahan Status AnakPewarganegaraan dan Kematian .

4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

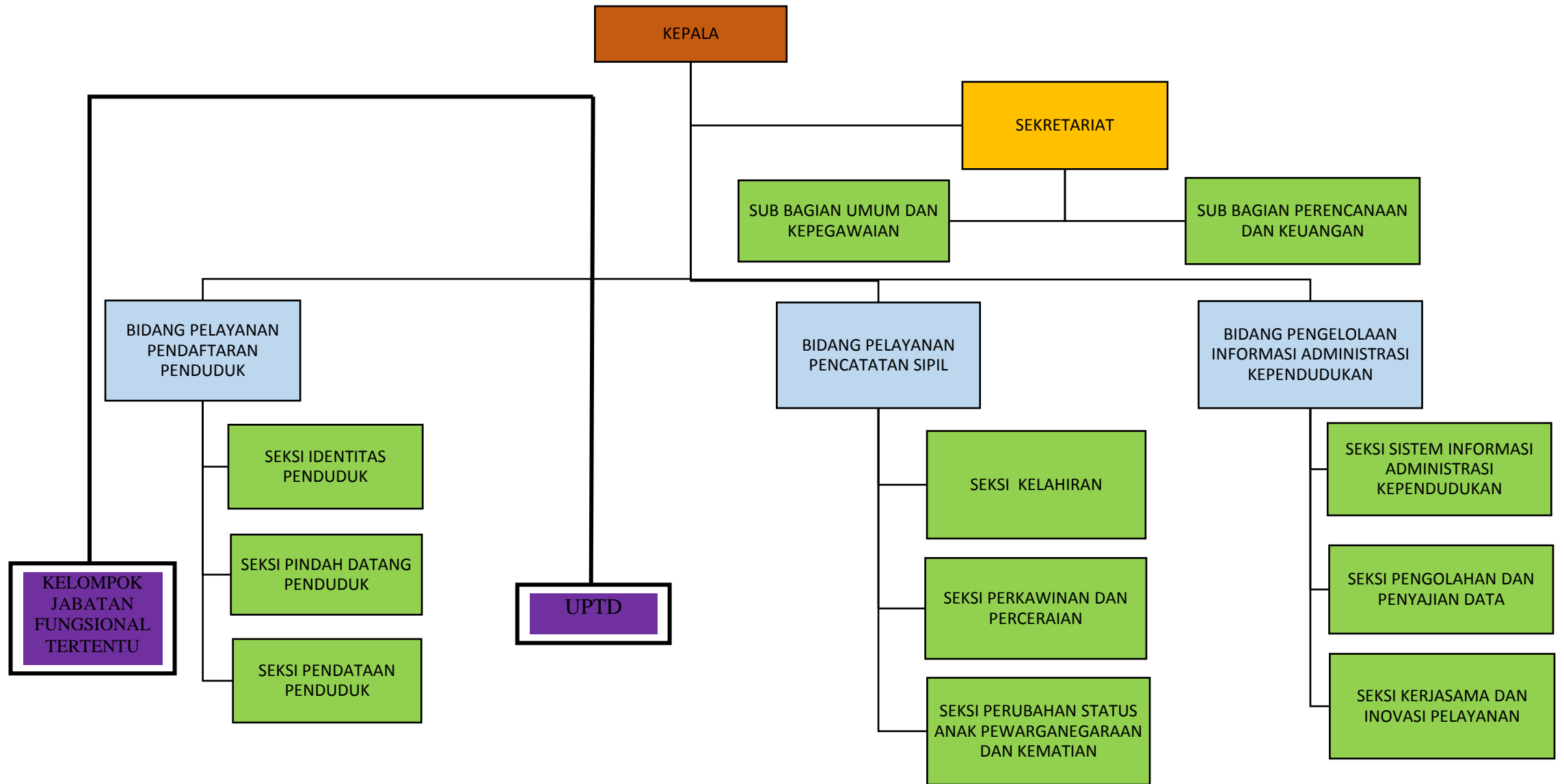
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Uraian tugas unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan , kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan.
3. Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Identitas Penduduk.
4. Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pindah datang penduduk.
5. Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendataan penduduk.
6. Seksi Kelahiran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang kelahiran.
7. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian.
8. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian.
9. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
10. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data.
11. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan inovasi pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Keadaan Pegawai

1. Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Per 31 Januari 2017 menurut Bidang/Sekretariat

| No | Bidang / Sekretariat | Jumlah |
|--------|---|--------|
| 1 | Sekretariat dan Kepala Dinas | 11 |
| 2 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 27 |
| 3 | Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 7 |
| 4 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 8 |
| Jumlah | | 53 |

2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Per 31 Januari 2017 menurut Golongan

| No | Golongan | Jumlah |
|--------|--------------|--------|
| 1 | Golongan IV | 6 |
| 2 | Golongan III | 33 |
| 3 | Golongan II | 14 |
| 4 | Golongan I | - |
| Jumlah | | 53 |

3. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan:

Tabel 2.3

Keadaan Pegawai Per 31 Januari 2017 menurut Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|------------|--------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 4 |
| 3 | Eselon IV | 11 |
| 4 | Staf | 37 |
| Jumlah | | 53 |

4. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.4

Keadaan Pegawai Per 31 Januari 2017 menurut Tingkat Pendidikan

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|---------|--------|
| 1 | S-2 | 3 |
| 2 | S-1 | 15 |
| 3 | D-3 | 6 |
| 4 | SLTA | 27 |
| 5 | SLTP | 2 |
| Jumlah | | 53 |

Formasi pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah sebanyak 92 orang, sedangkan kondisi riil saat ini ada 53 orang terdiri dari 38 orang di Dinas, dan 15 orang berada di Kecamatan Wates, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Kokap, Nanggulan, Girimulyo dan Samigaluh. Sehingga dari sisi kuantitas, untuk SDM belum dapat terpenuhi dalam rangka menunjang kegiatan bidang-bidang maupun sekretariat namun demikian semua personil yang ada didayagunakan secara optimal.

Dari sisi kualitas seluruh personil yang terkait dengan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah mempunyai *basic* pelatihan komputer khusus untuk petugas pelayanan dan operator SIAK.. Diharapkan ke depan dapat terwujud terpenuhinya kebutuhan personil untuk menunjang kegiatan di semua bidang maupun sekretariat. Dari keseluruhan pejabat Eselon yang ada, ada 2 pegawai yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjenjangan / Diklatpim Tingkat IV, selebihnya sudah mengikuti Diklatpim IV, Diklatpim II dan Diklatpim III.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5

Kondisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Per 30 Juni 2017

| No | Jenis Aset | Per 30 Juni 2017 | | | |
|----|------------------|------------------|--------------|---------------|-----|
| | | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | % |
| 1. | Tanah | 1 | 1 | | 100 |
| 2. | Mini Genset | 2 | 2 | | 100 |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 2 | 2 | | 100 |
| 4. | Kendaraan roda 2 | 5 | 5 | | 100 |
| 5. | Mesin ketik | 1 | 1 | | 100 |

| No | Jenis Aset | Per 30 Juni 2017 | | | |
|-----|---------------------------|------------------|--------------|---------------|-----|
| | | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | % |
| 6. | Mesin Antrian Pemohon | 1 | 1 | - | 100 |
| 7. | Lemari Arsip/Rool Opect | 3 | 3 | - | 100 |
| 8. | Rak server | 1 | 1 | - | 100 |
| .9. | Rak Buku Arsip Pelayanan | 3 | 3 | - | 100 |
| 10. | Filing kabinet | 3 | 3 | - | 100 |
| 11. | Tempat koran | 1 | 1 | - | 100 |
| 12. | Lemari Kendali | 1 | 1 | - | 100 |
| 13. | Papan Pengumuman | 1 | 1 | - | 100 |
| 14. | LCD Proyektor | 1 | 1 | - | 100 |
| 15. | Genset | 1 | 1 | - | 100 |
| 16. | Gronding | 1 | 1 | - | 100 |
| 17. | Partisi Aluminium | 1 | 1 | - | 100 |
| 18. | Tower | 1 | 1 | - | 100 |
| 19. | Almari | 7 | 7 | - | 100 |
| 20. | Rak kayu | 8 | 8 | - | 100 |
| 21. | Sekat ruang pelayanan | 1 | 1 | - | 100 |
| 22. | Meja | 52 | 52 | - | 100 |
| 23. | Kursi | 12 | 12 | - | 100 |
| 24. | Meja Pelayanan | 1 | 1 | - | 100 |
| 25. | Kursi | 62 | 62 | - | 100 |
| 26. | Tangga Aluminium | 1 | 1 | - | 100 |
| 27. | Cisco Router | 1 | 1 | - | 100 |
| 28. | Rak arsip | 6 | 6 | - | 100 |
| 29. | AC | 13 | 13 | - | 100 |
| 30. | Televisi | 2 | 2 | - | 100 |
| 31. | Wireless | 1 | 1 | - | 100 |
| 32. | Stabilizer * | 14 | 14 | - | 100 |
| 33. | Tiang bendera | 1 | 1 | - | 100 |
| 34. | Gordyn | 1 | 1 | - | 100 |
| 35. | Tralis jendele | 1 | 1 | - | 100 |
| 36. | Komputer / PC Komputer ** | 18 | 18 | - | 100 |
| 37. | Personal komputer | 8 | 8 | - | 100 |
| 38. | Power Supply | 3 | 3 | - | 100 |
| 39. | Lap Top | 13 | 13 | - | 100 |
| 40. | PC Note Book | 1 | 1 | - | 100 |
| 41. | Hard Disk Eksternal | 5 | 5 | - | 100 |
| 42. | Card Reader | 6 | 6 | - | 100 |
| 43. | LCD Monitor | 2 | 2 | - | 100 |
| 44. | Printer e-KTP | 3 | 3 | - | 100 |
| 45. | Faximilie | 1 | 1 | - | 100 |

| No | Jenis Aset | Per 30 Juni 2017 | | | |
|-----|------------------------|------------------|--------------|---------------|-----|
| | | Jumlah (Unit) | Kondisi Baik | Kondisi Rusak | % |
| 46. | Meja Komputer | 10 | 10 | - | 100 |
| 47. | Meja tulis biro sedang | 1 | 1 | - | 100 |
| 48. | Printer *** | 34 | 34 | - | 100 |
| 49. | Scanner | 2 | 2 | - | 100 |
| 50. | Server | 4 | 4 | - | 100 |
| 51. | Router **** | 13 | 13 | - | 100 |
| 52. | Finger Print KTP-el | 1 | 1 | - | 100 |
| 53. | Iris Scaner | 1 | 1 | - | 100 |
| 54. | Kamera Digital | 1 | 1 | - | 100 |
| 55. | Radio Mikrotik | 1 | 1 | - | 100 |
| 56. | Signature Pad | 1 | 1 | - | 100 |
| 57. | Smartcard Reader | 2 | 2 | - | 100 |
| 58. | Ear Phone | 2 | 2 | - | 100 |
| 59. | IP Phone ***** | 13 | 13 | - | 100 |
| 60. | Pesawat Telephone | 1 | 1 | - | 100 |
| 61. | UPS ***** | 14 | 14 | - | 100 |
| 62. | CCTV | 1 | 1 | - | 100 |
| 63. | Bangunan Gedung Kantor | 1 | 1 | - | 100 |
| 64. | Taman | 1 | 1 | - | 100 |
| 65. | Tower ***** | 17 | 17 | -- | 100 |
| | | | | | |
| | Jumlah | 403 | 403 | - | |

NB. :

- * Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- ** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- *** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- **** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- ***** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- ***** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
- ***** Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit

Kondisi saat ini gedung belum sepenuhnya representatif baik dari sisi bangunan, kenyamanan, maupun dari sisi penataan dan penempatan ruangan untuk para karyawan, ruangan pelayanan kepada masyarakat, tempat parkir karyawan dan pengunjung pelayanan serta ruangan penyimpanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maupun penyimpanan arsip-arsip administratif kantor. Mengingat hal tersebut secara bertahap masih direncanakan untuk diadakan rehab dan pemeliharaan gedung hingga tahun-tahun mendatang.

Penyimpanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk saat ini sebagian dititipkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dilakukan untuk keamanan dokumen serta karena tempat penyimpanan sudah tidak tersedia lagi atau tidak memungkinkan lagi. Mengingat hal tersebut masih diperlukan tambahan ruang/gedung untuk penyimpanan dokumen dimaksud yang lebih representatif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan yang tersedia.

1.3 . Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
- c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;
- d. Cakupan penerbitan Akta Kematian;

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Periode tahun 2011-2016) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Capaian Jumlah Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil

| No | Indikator sesuai TUPOKSI | Satuan | Realisasi Capaian Tahun | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| A. | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| 1. | Kartu Keluarga | Set | 27.441 | 29.150 | 43.199 |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk | keping | 24.811 | 37.087 | 28.086 |
| 3. | Surat Keterangan Pindah | dokumen | 3.174 | 3.651 | 4.257 |
| 4. | Surat Keterangan Datang | dokumen | 3.606 | 4.415 | 4.689 |
| B. | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |
| 1. | Akta Kelahiran | dokumen | 5.382 | 4.719 | 5.286 |
| 2. | Akta Kematian | dokumen | 6.360 | 6.650 | 7.690 |
| 3. | Akta Perkawinan | dokumen | 153 | 151 | 139 |
| 4. | Akta Perceraian | dokumen | 23 | 15 | 15 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---|---|----|
| 5. | Akta Pengakuan dan pengesahan anak | dokumen | - | 4 | 4 |
| 6. | pengangkatan Anak | dokumen | 0 | 0 | 13 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 penerbitan KTP (masyarakat pemohon KTP) mengalami peningkatan sementara dari tahun 2015 ke tahun 2016 ke tahun tingkat penerbitan KTP (masyarakat pemohon KTP) menunjukkan penurunan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan alokasi blangko KTP-el dari pusat/Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk penerbitan Akta Kelahiran tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami dinamika turun naik hal ini disebabkan jumlah penerbitan akta tergantung pada jumlah pemohon/masyarakat yang membutuhkan dokumen. Dapat dijelaskan pula bahwa target dan Prosentase jumlah Penduduk yang ber-KTP, Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga (KK), Jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran, dan penerbitan Akta Kematian, format penghitungannya adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yg ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

- Target : 100 % tahun 2017

2. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

- Target : 100% pada tahun 2017

3. Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

- Target : 92,22 pada tahun 2017

4. Persentase penerbitan Akta Kematian

$$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian di tahun yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- Target : 77,68 % pada tahun 2017

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat secara berturut-turut pada tabel berikut:

Tabel. 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2016

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Satuan | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | | | 16 | 17 | 17 | | |
| A. | Standar Pelayanan Minimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | % | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk | % | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,19 | 96,75 | 97,39 | 98,28 | 95,92 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,96 |
| 3 | Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | % | 90 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,77 | 94,24 | 98,55 | 97,80 | 96,55 | 0,97 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 4 | Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian | % | 70 | | | 50 | 50 | 55 | 65 | 70 | 28,08 | 47,16 | 85,75 | 77,37 | 98,76 | 0,56 | 0,94 | 1,56 | 1,19 | 1,41 |
| B. | Indikator Kinerja Kunci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kepemilikan KTP | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85,45 | 90,11 | 97,39 | 97,39 | 96,25 | 0,85 | 0,90 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| 2 | Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 penduduk | orang | | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 62,15 | 61,65 | 66,99 | 65,10 | 67,71 | 0,062 | 0,062 | 0,067 | 0,065 | 0,068 |
| 3 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | | sudah | | - | sudah | sudah | sudah | sudah | - | sudah | sudah | sudah | sudah | - | sudah | sudah | sudah | sudah |
| C. | Indikator Kinerja RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP | % | | | | 100 | 100 | 99,37 | 100 | 100 | 85,45 | 90,11 | 97,39 | 98,28 | 96,25 | 0,85 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| 2. | Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta kelahiran | % | | | | 100 | 100 | 63,82 | 64,07 | 64,96 | 62,15 | 61,65 | 66,99 | 65,10 | 67,71 | 0,62 | 0,62 | 1,05 | 0,98 | 1,04 |
| 3. | Pemanfatatan dan Pemeliharaan IT | Unit Pelayanan | | | 1 dinas, 1 UPTD, 12 Kec., 1 Kel. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel 2.8. Capaian Pelayanan Dokumen Kependudukan

| No | Jenis Pelayanan | SPM Indikator | Target (Th 2016) % | Realisasi Tahun (%) | | |
|----|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100 | 97,39 | 98,28 | 95,92 |
| | | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 90 | 98,55 | 97,80 | 96,55 |
| | | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 70 | 85,75 | 77,37 | 98,76 |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Kulon Progo dibanding dengan wajib KTP maupun tingkat kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir mengalami dinamika naik turun hal ini dikarenakan jumlah penerbitan dokumen tersebut tergantung kepada tingkat kesadaran masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan. Akan tetapi capaian kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah melebihi dari target Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota pada 3 (tiga) indikator SPM, sedangkan 1 (satu) indikator SPM terkait kepemilikan KTP belum dapat mencapai target.

Terbitnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian dan peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan selama 3 masa periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo

| Uraian | Anggaran pada tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun | | | | | Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | | | | | |
| Uraian Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.170.959.100 | 1.303.909.050 | 1.368.478.900 | 625.507.750 | 1.099.729.700 | 1.085.279.150 | 1.214.907.958 | 1.335.796.400 | 618.431.128 | 1.085.432.737 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,09 | 0,11 |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.170.959.100 | 1.303.909.050 | 1.368.478.900 | 625.507.750 | 1.099.729.700 | 1.085.279.150 | 1.214.907.958 | 1.335.796.400 | 618.431.128 | 1.085.432.737 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,09 | 0,11 |
| Program Kegiatan Setiap OPD | 362.101.510 | 389.964.740 | 531.283.700 | 538.434.800 | 1.314.479.700 | 335.080.374 | 362.251.496 | 491.468.115 | 518.852.482 | 1.265.502.002 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,47 | 0,48 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 203.397.850 | 305.118.950 | 217.670.950 | 156.200.800 | 169.491.150 | 182.091.618 | 280.538.482 | 203.552.243 | 155.012.231 | 165.354.823 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 0,004 | 0,02 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 149.388.910 | 78.322.790 | 293.362.750 | 0 | 0 | 143.737.006 | 76.196.164 | 268.169.472 | 0 | 0 | 0,96 | 0,97 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,35 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.400.000 | 2.698.000 | 10.500.000 | 0 | 0 | 3.400.000 | 2.681.750 | 10.317.850 | 0 | 0 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0 | 0 | 0,56 | 0,55 |
| Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 2.182.500 | 1.318.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 2.143.500 | 668.000 | 6.754.650 | 0 | 0 | 0,98 | 0,51 | 0,96 | 0 | 0 | 0,97 | 2,47 |
| Program Pengawasan dan Pengendalian program | 3.732.250 | 2.507.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 3.708.250 | 2.477.100 | 2.673.900 | 0 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0 | 0 | -0,41 | -0,42 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|--|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 345.585.000 | 1.115.488.550 | 0 | 0 | 0 | 328.591.251 | 1.070.709.604 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,96 | 2,23 | 2,26 |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi kinerja | 0 | 0 | 0 | 19.500.000 | 24.250.000 | 0 | 0 | 0 | 19.348.000 | 24.187.575 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 1,00 | 0,24 | 0,25 |
| Program Peningkatan Sumber Daya manusia SKPD | 0 | 0 | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 | 15.901.000 | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 1,00 | -0,69 | -0,67 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil. Sistem pelayanan satu hari jadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah diimplementasikan sejak tanggal 1 April 2013. Dalam rangka melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni sebagai berikut:

- a. Masih banyak penduduk yang tidak bersedia mengurus dokumen kependudukan sendiri dan meminta bantuan pihak lain sehingga berakibat pada pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan;
- b. Data kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman;
- d. Pemberian pelayanan pencatatan sipil yang inovatif, mudah, cepat, akurat dan gratis.

2.4.2. Peluang

Di samping adanya tantangan yang harus dihadapi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan, sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum;
- b. Adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Adanya kebutuhan pelayanan yang berkembang terkait dengan mega proyek, adanya pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit, BPN, Kementerian Agama, Imigrasidan SKPD atau lembaga lainnya;
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutakhiran dan validitas data kependudukan;
- e. Peran aktif serta tingkat pengetahuan dan pemahaman informasi dari masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah dituntut untuk ikut menuntaskan program nasional dalam pemberian dokumen kependudukan bagi penduduk;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama atau memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk juga mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat .

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid dan tidak berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam

rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwakependudukan, yang dimulai dari kelahiran, perkawinan, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya atau keluarganya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut, isu-isu yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.1.1 Isu yang ada :

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih belum optimal;
 - b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih belum optimal, terlihat masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan;
 - c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnyamemiliki dokumen kependudukan masih belum optimal;
 - d. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP;
 - e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan belum optimal;
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Data base Kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
- b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum semuanya bersifat digital;
- d. Belum semua *stakeholders* memanfaatkan data kependudukan;

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Adanya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
- b. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line* untuk Kelahiran dan kematian;

4. Sekretariat

- a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
- b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD;
- c. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ini belum mencukupi/representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil.

3.1.2 Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu menjadi optimal;
- b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga menjadi optimal, dimana setiap terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang selalu dilaporkan oleh penduduk;
- c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti penting memiliki dokumen kependudukan menjadi optimal;
- d. Semua penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman KTP-el;
- e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/kelurahan, Kecamatan menjadi optimal;

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir;
 - b. Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. Pemanfaatan data oleh semua *stakeholders*;
 - d. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil semuanya dalam format manual dan Digital;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- a. Teratasinya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line* untuk Kelahiran dan kematian
4. Sekretariat
- a. Tersedianya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor yang lebih representatif;
 - b. Terpenuhi personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat OPD;
 - c. Tersedianya tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil.

:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|--|--|---|--|---|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN OPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Gambaran pelayanan SKPD | Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 12 tahun 2006 • UU No. 23 tahun 2006 • UU No. 24 tahun 2013 • PP No. 37 tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No. 02 Tahun 2012 • PP No. 25 tahun 2008 • Permendagri No. 28 tahun 2005 • Perda KP No. 3 tahun 2010 • Perbup KP No. 67 Tahun 2010 • Indeks Kepuasan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen yang tinggi dari SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pemahaman masyarakat • Kondisi alam yang merusak sarana pendukung sistem <i>on-line</i> • Kebijakan dibidang administrasi kependudukan yang sering berubah | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan • Masih banyak penduduk yang tidak mau memenuhi ketentuan tentang prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan • Belum adanya tempat penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif |
| Kajian terhadap Renstra OPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY • Pelaporan ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2006 • UU No. 24 Tahun 2013 • PP No. 37 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012 • Permendagri No.28 Tahun 2005 | Koordinasi antar Bidang/Seksi | Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY | Belum optimalnya koordinasi permasalahan kependudukan |
| Kajian terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2006 • UU No. 24 Tahun 2013 • PP No. 37 | Ketepatan pelaksanaan administrasi kependudukan dengan peraturan | Informasi kebijakan dari pemerintah pusat | Masih belum jelasnya alokasi anggaran pusat untuk pengeloaan administrasi |

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|--------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN OPD) | EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Sipil <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan profil kependudukan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No, 102 Tahun 2012 <ul style="list-style-type: none"> • Permendagri No.28 Tahun 2005 | perundangan | | kependudukan |

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| No. | Isu Strategis | | | |
|-----|---|--|---|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | KTP di beberapa negara dapat digunakan untuk berbagai keperluan | KTP di Indonesia sebagai identitas resmi bukti diri penduduk belum dapat digunakan untuk berbagai keperluan. | Setiap perubahan elemen data pada biodata penduduk belum dilaporkan secara tertib | |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya ;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi ketiga yakni “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan ketertiban dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketertiban juga dihimbau kepada masyarakat pada pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib.Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih kurang optimal, sehingga berakibat pada kepemilikan dokumen kependudukan yang belum memenuhi target.

Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ternyata masih terdapat hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya. Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa” | | | | |
|--|--|---|--|--|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan • Masih banyak penduduk yang belum mengetahui/memahami ketentuan tentang prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen • Belum adanya tempat penyimpanan arsip kependudukan dan Pencatatan sipil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya cakupan obyek sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 2. Terbatasnya lahan dan bangunan gedung yang dapat digunakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |

3.3 Telaahan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kementerian/lembaga yang mengurus kewajiban tersebut di tingkat Pemerintah Pusat adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017 – 2022, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri 2019-2022 adalah: "Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, menegakkan Demokrasi dan menjaga Integrasi Bangsa". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat;

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari enam misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, jelas terlihat bahwa pendayagunaan administrasi kependudukan akan ditingkatkan hingga waktu-waktu mendatang, sehingga hal ini sesuai dan selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2017 – 2022 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri | Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat validitas database kependudukan belum tinggi • Adanya data penduduk ganda | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan • Kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen SDM yang tinggi dalam pelayanan administrasi kependudukan • Adanya regulasi yang jelas mengatur tentang administrasi kependudukan |
| 2 | Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk | Masih adanya penduduk yang belum mempunyai NIK | Adanya opini dari sebagian masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan yang sulit dan berbelit-belit | Kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pengurusan dokumen kependudukan |
| 3 | Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan | NIK belum digunakan sebagai dasar untuk penerbitan identitas penduduk yang lain | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak/belum ada regulasi yang mengatur • Tidak ada/belum ada koordinasi antara <i>stake holders</i> (pemangku kepentingan) | Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terintegrasi serta mudah, murah dan cepat |
| 4 | Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan | Tidak semua permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan bisa diatasi dengan regulasi yang ada | Adanya penduduk yang minta pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak mendasarkan pada regulasi yang berlaku | Adanya komitmen dari OPD untuk memberikan pemecahan permasalahan administrasi kependudukan |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri | Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo | Sebagai Faktor | |
|-----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan | Belum semua perencanaan didasarkan pada data kependudukan yang bersumber pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Adanya beberapa data kependudukan yang tidak sama dikelola berbagai instansi | Adanya regulasi yang mewajibkan penggunaan data penduduk yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6 | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan | Kurangnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan | Ketidakpedulian masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan | Semua penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan |

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD . Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat ditisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu penyusunan Renstra Dukcapil Kulon Progo Tahun 2017-2022 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS Renstra sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu antara lain mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka pemerintah telah memprogramkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Induk Kependudukan (NIK), Penerapan KTP elektronik.

Tiga Program Strategis Nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pemilukada selanjutnya, peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara dan efektifitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintah. Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional ini, maka terbangun pula data base kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis pada NIK, maka dapat diterbitkan KTP Elektronik yang berlaku secara Nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/lokal sebagai persyaratan publik. Disamping itu KTP Elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-3 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yakni :

- a. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- b. Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan;
- c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah, nyaman dan akuntabel;
- d. Pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan akan berimplikasi pada pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Tuntutan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang representative;
- f. Adanya beberapa kewenangan pengelolaan SIAK yang masih menjadi domain pusat;
- g. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena Kelahiran, Perkawinan, Kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki wacana dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan *Three In One* Kelahiran dan Kematian;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pencetakan KTP-EI untuk 10 Kecamatan
3. Pembangunan Gedung untuk Dinas, pelayanan serta penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih representatif
4. Peningkatan Sarana Prasarana khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat;
5. Pendataan Penduduk Non Permanen;
6. Pemutakhiran Data Penduduk pada 12 Kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Implementasi azas domisili, stelsel aktif dan sistem *on-line* dalam pencatatan sipil;
8. Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
9. Melakukan pelayanan keliling/jemput bola dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan melibatkan instansi terkait;
11. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi ke Desa/Kelurahan, media luar ruang, media elektronik, media cetak maupun melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pemberdayaan Kader Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Lembaga Perguruan Tinggi melalui KKN.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Indikator Kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan formula penghitungan meliputi hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Transisi 2017 | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,00 | 79,25 | 79,50 | 79,75 | 80,00 | 80,25 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : “ Terwujudnya masyarakat Kulon progo yang sejahtera , aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa” | | | |
|---|---|--|--|
| MISI : “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram” | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Peningkatan jumlah penduduk ber-KTP menjadi 100% |
| | | | Peningkatan jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga menjadi 100% |
| | | | Peningkatan Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akte Kelahiran menjadi 95,01% |
| | | | Peningkatan Penerbitan Akta Kematian di tahun yang bersangkutan menjadi 98,87% |
| | | | Peningkatan Jumlah penghapusan data ganda dan anomali menjadi 87,42% |
| | | | Peningkatan jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang dialihmediakan menjadi 100% |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD.

Selanjutnya rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif APBD tahun 2017-2019 sebagaimana tabel 6.1 dan rencana tahun 2020-2022 sebagaimana tabel 6.2 . Sedangkan rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2017-2019 sebagaimana tabel 6.3. dan rencana tahun 2020-2022 sebagaimana tabel 6.4 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kulon Progo Tahun 2018-2019 (APBD)

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal Tahun 2016 | Tahun 2017 (Transisi) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja OPDPenanggung jawab | Lokasi | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----|----|----|----|--|--|-----------------------|-----------------------|--------|---|--------|-------------|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | target | Rp. | target | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | 2 | 06 | 01 | 15 | 33 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 991.547.025 | 100 | 869.890.000 | 100 | 391.560.000 | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo | | |
| | | | | | | | Indikator Tujuan : Capaian Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP 2. Persentase jumlah kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 33 | Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk | 7.000 | 7.000 | 806.599.100 | 4.000 | 509.411.200 | 4.000 | 215.800.000 | Seksi Identitas Penduduk | Kabupaten Kulon Progo | | |
| | | | | | | | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping) | 9.000 | 9.000 | | 4.000 | | 4.000 | | | | | |
| | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (set) | 7.000 | 7.000 | | 4.000 | | 15.500 | | | | | |
| | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set) | - | - | | 15.000 | | 15.500 | | | | | |
| | | | | | | | Terekamnya KTP-el penduduk (orang) | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|--|---|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Terbitnya KIA (DAK) (keping) | 25.000 | 25.000 | | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 34 | Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen) | 4.000 | 4.000 | 55.934.200 | 1.000 | 95.568.800 | 1.000 | 45.250.000 | Seksi Pindah Datang Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen) | 4.000 | 4.000 | | 1.000 | | 1.016 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 800 | | 980 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 800 | | 1.000 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 35 | Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan | Tersusunnya profil kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 93.216.325 | 1 | 209.910.000 | 1 | 100.510.000 | Seksi Pendataan Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 38 | Pendataan Kependudukan | Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan) | 1 | 1 | 35.797.400 | 1 | 64.000.000 | 1 | 30.000.000 | Seksi Pendataan Penduduk | |
| | Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil | 2 | 06 | 01 | 16 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | 70,23 | 95,49 | 571.373.350 | 95,78 | 475.078.350 | 96,07 | 131.730.000 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | Persentase Penbitan Akta Kematian | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|---|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--|-----------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 01 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 249.373.775 | 5.000 | 235.102.900 | 5.000 | 52.000.000 | Seksi Kelahiran | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 02 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen) | 150 | 150 | 72.833.650 | 70 | 127.215.300 | 70 | 30.000.000 | Seksi Perkawinan dan Perceraian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 70 | | 70 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 03 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 249.165.925 | 5.000 | 112.760.150 | 5.000 | 49.730.000 | Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen) | 11 | 11 | | 2 | | 2 | | | |
| | Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan | 2 | 06 | 01 | | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 0 | 100 | 861.088.800 | 100 | 338.100.000 | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | Persentase pengelolaan data ganda dan anomali pada datavase SIAK | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang dialihmediakan | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 15 | Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK | 17 | 17 | 626.039.950 | 17 | 300.138.000 | 17 | 100.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 17 | Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil | | | 211.633.950 | | 190.000.000 | | 63.000.000 | Seksi Pegolahan dan Penyajian data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | Re-entry dokumen (buku) | 4.320 | 4.320 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | Scan dokumen (buku) | 1.800 | 1.800 | | 0 | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--|--|-------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Jilid dokumen (buku) | 1.000 | 1.000 | | 500 | | 500 | | | | |
| | | | | | | | Re-entry dokumen (DAK) (buku) | 2.880 | 2.880 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Scan dokumen (DAK) (buku) | 3.500 | 3.500 | | 2.600 | | 2.600 | | | | |
| | | | | | | | Jilid dokumen (DAK) (buku) | 104 | 104 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 32 | Pengelolaan Database Kependudukan | Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku) | 25 | 25 | 37.062.575 | 28 | 72.675.000 | 30 | 36.000.000 | Seksi Pengelolaan dan Penyajian data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 36 | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang) | 500 | 500 | 90.382.200 | 600 | 147.899.900 | 600 | 49.899.900 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | Publikasi melalui media luar ruang (paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 37 | Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 29.760.550 | 1 | 60.375.000 | 1 | 20.375.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|----|----|----|----|---|---|---|---------------|---|---------------|---|-------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 38 | Pengembangan Aplikasi SIAK | 3 | 3 | 34.025.100 | 2 | 90.000.000 | 2 | 68.825.100 | Seksi Sism Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 2.591.824.700 | | 2.206.057.150 | | 861.390.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal Tahun 2016 | Tahun 2017 (Transisi) | | Target Kinerja dan kerangka pendanaan | | | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---------------------------------------|---|---------------------------|----|----|----|----|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | | capaian | Target | Rp | Target | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 2 | 06 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) | 100 | 20 | 181.214.400 | 20 | 197.199.200 | 20 | 154.120.000 | Sekretariat | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 26 | Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran | Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan) | 12 | 12 | 114.966.200 | 12 | 132.713.700 | 12 | 88.120.000 | | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 27 | Penyediaan Jasa Keuangan | Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 12 | 12 | 33.437.000 | 12 | 33.181.500 | 12 | 34.000.000 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|--|--|-----------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|------------------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 28 | Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi | Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi | 12 | 12 | 32.811.200 | 12 | 31.304.000 | 12 | 32.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | Meningkatnya sarana/prasarana kerja dan kualitas Sumber daya Manuasi OPD | 2 | 06 | 01 | 11 | | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD | Sarana prasarana kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas sumber daya manusia OPD (orang) | 20 | 20 | 1.130.545.600 | 20 | 592.229.275 | 20 | 449.200.000 | Sekretariat | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (unit) | 18 | 18 | 497.080.600 | 25 | 131.149.900 | 17 | 132.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 02 | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja (unit) | 35 | 35 | 627.465.000 | 50 | 455.262.375 | 50 | 311.200.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 03 | Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal (orang) | 0 | 0 | 6.000.000 | 6 | 5.817.000 | 6 | 6.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | Meningkanya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 2 | 06 | 01 | 12 | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) | 20 | 20 | 48.126.700 | 20 | 64.888.500 | 20 | 49.000.000 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen) | 2 | 2 | 26.520.700 | 2 | 12.542.250 | 2 | 12.542.250 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 02 | Penyusunan Laporan Keuangan | Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen) | 4 | 4 | 7.500.000 | 14 | 25.112.000 | 14 | 25.112.000 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|----|----|----|--|--|----|----|---------------|----|-------------|----|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 03 | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja | Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen) | 20 | 20 | 14.106.000 | 20 | 27.234.250 | 20 | 11.345.750 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 1.359.886.700 | | 854.316.975 | | 652.320.000 | | |

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2022 (APBD)

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----|----|----|--|---|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Renstra OPD | |
| | | | | | | | | | Capaian | Target | Rp | Target | Rp | Target | | | Rp | Target |
| 1 | 2 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | 2 | 06 | 01 | 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Capaian Penataan Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 377.270.000 | 100 | 407.960.000 | 100 | 491.490.000 | 100 | 1.276.720.000 | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | Persentase jumlah Kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|---|--|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 33 | Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (keping) | 7.000 | 4.000 | 201.510.000 | 4.000 | 225.450.000 | 4.000 | 274.490.000 | 20.000 | 701.450.000 | Seksi Identitas Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (DAK) (keping) | 9.000 | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 20.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (set) | 7.000 | 16.000 | | 16.500 | | 17.000 | | 80.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set) | - | 16.000 | | 16.500 | | 17.000 | | 80.000 | | | |
| | | | | | | | | Terekamnya KTP-el penduduk (orang) | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 30.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya KIA (DAK) (keping) | 25.000 | 25.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 105.000 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 34 | Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen) | 4.000 | 1.178 | 45.250.000 | 1.396 | 47.000.000 | 1.635 | 60.000.000 | 6.209 | 152.250.000 | Seksi Pindah Datang Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen) | 4.000 | 1.258 | | 1.529 | | 1.832 | | 6.635 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen) | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 4.780 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen) | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 4.800 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|------------------------------|--|
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 35 | Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan | Tersusunnya profil kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 100.510.000 | 1 | 100.510.000 | 1 | 120.000.000 | 5 | 321.020.000 | Seksi Pendataan Penduduk | Kabupaten Kulon Progo | |
| | | | | | | | | Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 15 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 38 | Pendataan Kependudukan | Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan) | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 37.000.000 | 5 | 102.000.000 | Seksi Pendataan Penduduk | Kabupaten Kulon Progo | |
| | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | 2 | 06 | 01 | 16 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | 94,79 | 95,50 | 126.920.000 | 95,78 | 137.240.000 | 96,07 | 165.340.000 | 96,07 | 429.500.000 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabupaten Kulon Progo | |
| | | | | | | | | Persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Penerbitan Akta Kematian | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 01 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 50.000.000 | 5.000 | 54.000.000 | 5.000 | 55.100.000 | 25.000 | 159.100.000 | Seksi Kelahiran | Kabupaten Kulon Progo | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 5.000 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 02 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen) | 150 | 150 | 29.000.000 | 70 | 32.000.000 | 70 | 39.000.000 | 430 | 100.000.000 | Seksi Perkawinan dan Perceraian | Kabupaten Kulon Progo | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|---|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 70 | | 70 | | 280 | | | |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 03 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | 5.000 | 5.000 | 47.920.000 | 5.000 | 51.240.000 | 5.000 | 71.240.000 | 25.000 | 170.400.000 | Seksi Perubahan Status Anak Pewargane garaan dan Kematian | Kabup aten Kulon Progo |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 5.000 | | | |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen) | 11 | 11 | | 2 | | 2 | | 19 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 17 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 6,13 | 80,93 | 325.760.000 | 87,35 | 352.260.000 | 93,71 | 424.390.000 | 93,71 | 1.102.410.000 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabup aten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 15 | Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK | 17 | 17 | 98.000.000 | 18 | 110.000.000 | 18 | 129.000.000 | 18 | 337.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabup aten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--|--|-------|-------|------------|------|------------|------|------------|--------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 17 | Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil | Terdokumentasinya berkas permohonan kependudukan dan Pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku, dokumen) | | | 60.000.000 | | 63.000.000 | | 80.000.000 | | 203.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (buku) | 4.320 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (buku) | 1.800 | 660 | | 660 | | 660 | | 3.300 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (buku) | 1.000 | 500 | | 500 | | 500 | | 2.500 | | | |
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (DAK) (buku) | 2.880 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (DAK) (buku) | 3.500 | 2.600 | | 2600 | | 2600 | | 13.000 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (DAK) (buku) | 104 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 32 | Pengelolaan Database Kependudukan | Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku) | 25 | 30 | 34.000.000 | 30 | 36.000.000 | 30 | 45.000.000 | 148 | 115.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 36 | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang) | 500 | 600 | 46.000.000 | 600 | 49.899.900 | 600 | 55.000.000 | 3.000 | 150.899.900 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|----|----|----|--|---|---|---|-------------|---|-------------|---|---------------|----|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | Publikasi melalui media luar ruang (paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 37 | Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 20.375.000 | 1 | 24.535.000 | 1 | 35.390.000 | 5 | 80.300.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 38 | Pengembangan Aplikasi SIAK | Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi) | 3 | 3 | 67.385.000 | 2 | 68.825.100 | 2 | 80.000.000 | 11 | 216.210.100 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 829.950.000 | | 897.460.000 | | 1.081.220.000 | | 2.808.630.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---------------------------------------|---|---------------------------|----|----|----|----|--|---|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir Renstra OPD | | | |
| | | | | | | | | | | Capaian | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2 | 06 | 01 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%) | 100 | 20 | 148.490.000 | 20 | 160.570.000 | 20 | 193.450.000 | 100 | 853.829.200 | Sekretariat | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 26 | Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran | Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan) | 12 | 12 | 82.490.000 | 12 | 90.570.000 | 12 | 107.450.000 | 60 | 501.343.700 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 27 | Penyediaan Jasa Keuangan | Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) | 12 | 12 | 34.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 36.000.000 | 60 | 172.181.500 | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 01 | 28 | Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi | Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi | 12 | 12 | 32.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 50.000.000 | 60 | 180.304.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD | Sarana prasarana kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas sumber daya manusia OPD (orang) | 20 | 20 | 432.810.000 | 20 | 468.020.000 | 20 | 565.850.000 | 100 | 2.508.109.275 | Sekretariat | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (unit) | 18 | 18 | 132.000.000 | 17 | 142.020.000 | 17 | 207.850.000 | 96 | 745.019.900 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 02 | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran | Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja (unit) | 35 | 35 | 294.810.000 | 60 | 320.000.000 | 65 | 350.000.000 | 265 | 1.731.272.375 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 11 | 03 | Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal (orang) | 0 | 0 | 6.000.000 | 6 | 6.000.000 | 6 | 8.000.000 | 24 | 31.817.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%) | 20 | 26 | 47.210.000 | 36 | 51.050.000 | 36 | 61.500.000 | 170 | 273.648.500 | Sekretariat | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|----|----|----|---|---|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|---------------|---|-----------------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen) | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.368.000 | 2 | 21.000.000 | 10 | 71.452.500 | Sub Bagian Perenc anaan dan Keuan gan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 02 | Penyusunan Laporan Keuangan | Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen) | 4 | 4 | 24.112.000 | 14 | 25.112.000 | 14 | 20.000.000 | 60 | 119.448.000 | Sub Bagian Perenc anaan dan Keuan gan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 12 | 03 | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja | Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen) | 20 | 20 | 11.098.000 | 20 | 12.570.000 | 20 | 20.500.000 | 100 | 82.748.000 | Sub Bagian Perenc anaan dan Keuan gan | Kabupaten Kulon Progo |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 628.510.000 | | 679.640.000 | | 820.000.000 | | 3.635.586.975 | | |

TABEL 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2019
DANA ALOKASI KHUSUS PELAYAAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal Tahun 2016 | Tahun 2017 (Transisi) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----|----|----|----|--|--|-----------------------|------------------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Capaian | Target | Rp | Target | | |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | 2 | 06 | 01 | 15 | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Capaian Penataan Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 465.021.200 | 100 | 580.896.900 | 100 | 570.000.000 | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 33 | Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (keping) | 7.000 | 7.000 | 427.645.200 | 4.000 | 407.288.100 | 4.000 | 450.000.000 | Seksi Identitas Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping) | 9.000 | 9.000 | | 4.000 | | 4.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (set) | 7.000 | 7.000 | | 15.000 | | 15.500 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set) | - | - | | 15.000 | | 15.500 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|---|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | PersentaseJumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran | | | | | | | | Kabupaten Kulon Progo | |
| | | | | | | | | Persentase Penerbitan Akta Kematian | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 01 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 190.972.600 | 5.000 | 197.152.400 | 5.000 | 140.000.000 | Seksi Kelahiran | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 02 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen) | 150 | 150 | - | 70 | 50.215.300 | 70 | 55.000.000 | Seksi Perkawinan dan Perceraian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 70 | | 70 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 16 | 03 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 191.985.000 | 5.000 | 39.294.900 | 5.000 | 100.000.000 | Seksi Perubahan Status Anak | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.00 | | 1.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|--|--|-------|-------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen) | 11 | 11 | | 2 | | 2 | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 | 06 | 01 | 16 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 315.334.200 | 100 | 400.084.500 | 100 | 435.000.000 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase pengelolaan data ganda dan anomali pada database SIAK | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang dialihmediakan | | | | | | | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 15 | Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK | Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el (unit jaringan) | 17 | 17 | 90.000.000 | 17 | 100.138.000 | 17 | 100.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 17 | Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil | Terdokumentasinya berkas kependudukan dan permohonan akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku) | | | 121.452.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (buku) | 4.320 | 4.320 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (buku) | 1.800 | 1.800 | | 660 | | 660 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (buku) | 1.000 | 1.000 | | 500 | | 500 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|----|----|--|---|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (DAK) (buku) | 2.880 | 2.880 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (DAK) (buku) | 3.500 | 3.500 | | 2.600 | | 2.600 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (DAK) (buku) | 104 | 104 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 32 | Pengelolaan Database Kependudukan | Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku) | 25 | 25 | 3.000.000 | 28 | 16.670.700 | 30 | 40.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 36 | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil (orang) | 500 | 500 | 90.382.200 | 600 | 97.899.900 | 600 | 100.000.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | Publikasi melalui media luar ruang (paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 37 | Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 500.000 | 1 | 25.375.900 | 1 | 35.000.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----|----|----|----|----------------------------|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-----------------------|
| | | 2 | 06 | 01 | 15 | 38 | Pengembangan Aplikasi SIAK | Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi) | 3 | 3 | 10.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 1.163.313.000 | | 1.267.644.000 | | 1.300.000.000 | | |

Tabel 6.4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2022
DANA ALOKASI KHUSUS PELAYAAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

| Tujuan | Sasaran | Kode Program dan Kegiatan | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Tahun Awal Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|--|--|-----------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | Tahun - 3 (2020) | | Tahun - 4 (2021) | | Tahun - 5 (2022) | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya pelayanan administrasi Kependudukan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Capaian Penataan Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 666.575.000 | 100 | 722.200.000 | 100 | 798.668.000 | 100 | 3.227.443.000 | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah Penduduk yang ber-KTP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (keping) | 7.000 | 4.000 | 500.000.000 | 4.000 | 550.000.000 | 4.000 | 600.000.000 | 20.000 | 2.450.000.000 | Seksi Identitas Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (DAK) (keping) | 9.000 | 4.000 | | 4.000 | | 4.000 | | 20.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (set) | 7.000 | 16.000 | | 16.500 | | 17.000 | | 80.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set) | - | 16.000 | | 16.500 | | 17.000 | | 80.000 | | | |
| | | | | | | | | Terekamnya KTP-el penduduk (orang) | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 30.000 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya KIA (DAK) (keping) | 25.000 | 25.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 105.000 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen) | 4.000 | 1.178 | 37.500.000 | 1.396 | 43.125.000 | 1.635 | 49.593.000 | 6.209 | 190.218.000 | Seksi Pindah Datang Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen) | 4.000 | 1.258 | | 1.529 | | 1.832 | | 6.635 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen) | 0 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 4.780 | | | |
| | | | | | | | | Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen) | 0 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 4.800 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan | Tersusunnya profil kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 85.200.000 | 1 | 85.200.000 | 1 | 105.200.000 | 5 | 375.600.000 | Seksi Pendataan Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | | Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen) | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | Pendataan Kependudukan | Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan) | 1 | 1 | 43.875.000 | 1 | 43.875.000 | 1 | 43.875.000 | 5 | 211.625.000 | Seksi Pendataan Penduduk | Kabupaten Kulon Progo |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | 2 | 0 | 0 | 1 | | Program Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | 70,23 | 96,36 | 315.000.000 | 96,65 | 340.000.000 | 96,94 | 365.000.000 | 96,94 | 1.610.000.000 | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Penerbitan Akta Kematian | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 01 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 150.000.000 | 5.000 | 150.000.000 | 5.000 | 150.000.000 | 25.000 | 730.000.000 | Seksi Kelahiran | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 5.000 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 02 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian (dokumen) | 150 | 150 | 65.000.000 | 70 | 65.000.000 | 70 | 65.000.000 | 430 | 305.000.000 | Seksi Perkawinan dan Perceraian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 70 | | 70 | | 280 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|----|---|--|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen) | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 03 | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen) | 5.000 | 5.000 | 100.000.000 | 5.000 | 125.000.000 | 5.000 | 150.000.000 | 25.000 | 575.000.000 | Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen) | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | | 5.000 | | | |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen) | 11 | 11 | | 2 | | 2 | | | 19 | | | |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 500.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 620.000.000 | 100 | 2.540.000.000 | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Persentase pengelolaan data ganda dan anomali pada database SIAK | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang dialihmediakan | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK | Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el (unit jaringan) | 17 | 17 | 110.000.000 | 18 | 110.000.000 | 18 | 120.000.000 | 18 | 540.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|----|--|--|-------|-------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil | Terdokumentasinya berkas permohonan kependudukan dan Pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku, dokumen) | | | 150.000.000 | | 170.000.000 | | 200.000.000 | | 780.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (buku) | 4.320 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (buku) | 1.800 | 660 | | 660 | | 660 | | 3.300 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (buku) | 1.000 | 500 | | 500 | | 500 | | 2.500 | | | |
| | | | | | | | | Re-entry dokumen (DAK) (buku) | 2.880 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | | | | | | | Scan dokumen (DAK) (buku) | 3.500 | 2.600 | | 2600 | | 2600 | | 13.000 | | | |
| | | | | | | | | Jilid dokumen (DAK) (buku) | 104 | - | | 0 | | 0 | | - | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | Pengelolaan Database Kependudukan | Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku) | 25 | 30 | 50.000.000 | 30 | 55.000.000 | 30 | 60.000.000 | 148 | 245.000.000 | Seksi Pengolahan dan Penyajian Data | Kabupaten Kulon Progo |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang) | 500 | 600 | 110.000.000 | 600 | 120.000.000 | 600 | 130.000.000 | 3.000 | 560.000.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|----|---------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali) | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | | | | | Publikasi melalui media luar ruang (paket) | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen) | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 5 | 250.000.000 | Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Kabupaten Kulon Progo |
| | | | | | | | | Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen) | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | Pengembangan Aplikasi SIAK | Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi) | 3 | 3 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 11 | 165.000.000 | Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kabupaten Kulon Progo |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 1.481.575.000 | | 1.612.200.000 | | 1.783.668.000 | | 7.377.443.000 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017 - 2022

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Transisi | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|--------|---|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP | % | 95,92 | 100 | 1001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran | % | 90,82 | 92,22 | 92,77 | 93,32 | 93,88 | 94,44 | 95,01 | 95,01 |
| 4. | Persentase Penerbitan Akta Kematian | % | 98,76 | 98,78 | 98,80 | 98,82 | 98,83 | 98,85 | 98,87 | 98,87 |
| 5. | Persentase Pengelolaan data ganda dan anomali pada database SIAK | % | 10,94 | 24,60 | 37,02 | 49,51 | 62,07 | 74,71 | 87,42 | 87,42 |
| 6. | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang dialihmediakan | % | 1,20 | 3,27 | 65,92 | 83,24 | 99,80 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022

| No | Indikator Kinerja Program | Satuan | Baseline Data Tahun 2016 | Transisi | Capaian Kinerja Program | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|-----|--|--------|--------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Capaian Penataan Administrasi Kependudukan | % | 97,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2. | Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil | % | 94,79 | 95,50 | 95,78 | 96,07 | 96,36 | 96,65 | 96,94 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3. | Capaian Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan | % | 6,13 | 13,94 | 51,47 | 66,37 | 80,93 | 87,35 | 93,71 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang akan dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo telah mengalami perubahan sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan.

Selanjutnya Renstra akan menjadi pedoman untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2017- 2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Renstra Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian serta evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN